

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Pengakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2006. *Dualisme Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.
- E. Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar, Jakarta.
- Hanitijo, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998. *Politik, Kekuasaan, dan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Hadjon, Philipus. *Et al.* 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah mada pers, Yogyakarta.
- Marbun. 1987. *Pokok pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenai hukum: suatu pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Natabaya, H.A.S. 2001. *Penegakan Supermasi Hukum: Edisi pertama*. Majalah hukum Nasional BPHN, Jakarta.
- Nawawi, Hadanari. 2008. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Pudyatmoko, Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum: suatu tujuan sosiologi*. Sinar Baru, Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo, Jakarta.
- Ridwan, H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara: edisi revisi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa Cetakan 26, Jakarta.
- Sumardjojo, Maria S.W. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian sebuah Panduan Dasar*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

## B. Jurnal

- Saputra, Hari Sarjana. Skripsi: *“Penegakan Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta”*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).
- Biantoro, Erwin Rizka. Skripsi: *“Analisis Yuridis Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Di Aatas tanah Bekas Rel Ketera Api di*

*Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*". (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 2018).

### C. Makalah

Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, makalah pada Penataran Administrasi dan Lingkungan Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90)

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 8 Seri D)

## **E. Internet**

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), “ Statistik Kepariwisata

2016”<https://visitingjogja.com/downloads/Buku%20Statistik%20Kepariwisata%20DIY%202016.pdf>, diakses pada 12 Februari 2018.

Antarayogya, “Pariwisata Sleman berkembang berkat peran masyarakat”  
<https://jogja.antaranews.com/berita/305919/pariwisata-sleman-berkembang-berkat-peran-masyarakat> diakses pada 12 Februari 2018.

Jawa Pos Radar Jogja, “ Sektor Pariwisata menjadi andalan penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.  
<https://www.jawapos.com/radarjogja/read/2017/12/18/34206/viral-di-medsos-kunjungan-wisatawan-sleman-meningkat> diakses pada 12 Februari 2018.

Kompas, “Pembangunan The Lost World Castle Yogyakarta Langgar Aturan”<http://regional.kompas.com/read/2017/02/03/20541171/pembangunan.the.lost.world.castle.di.yogyakarta.langgar.aturan> diakses pada 12 Februari 2018.

12 macam kelengkapan Izin usaha, <http://webbisnis.com/12-macam-kelengkapan-izin-usaha-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses pada 12 Februari 2018.